

MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENGEMBANGKAN LITERASI DIGITAL WARGA NEGARA

Ronni Juwandi, M.Pd¹, Yasin Nurwahid², Ayu Lestari³

^{1,2,3} PPKn, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
E-mail : ron_roju@untirta.ac.id

Abstract

The background of this research is based on the problems that occur among students as potential voters in the 2019 Election. This is evidenced by the existence of social media (Twitter, Instagram) as a mass communication network that is in demand by the younger generation. But it seems that social media has acted as a means of digital political education because it contains campaign narratives or invitations to participate in the 2019 Election. Besides discourse on politics, there are still some hoaxes that meet the timeline on social media. This is the problem of how ideally the position of social media as a means of adequate political education for citizens. Problem formulation is how the role of social media as a means of political education to improve digital literacy of citizens. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used using literature studies, interviews and observations. The data analysis technique used is source triangulation and methods. The results showed that social media has a role as a means of digital political education for citizens even though it is still in the exploration phase of data regarding candidates and candidates to be elected in the 2019 election constituency. This shows that the existence of social media is able to attract young people as citizens who participated in the 2019 election.

Keywords : *social media, political education, digital literacy.*

Abstrak

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah atas dasar permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa sebagai calon pemilih dalam Pemilu 2019. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi media sosial (Twitter, Instagram) sebagai jejaring komunikasi massa yang diminati oleh generasi muda. Namun tampaknya media sosial sudah berperan sebagai sarana pendidikan politik digital karena di dalamnya sudah berisi narasi kampanye ataupun ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Selain diskursus tentang politik, masih ditemukan beberapa berita bohong (hoax) yang memenuhi linimasa di media sosial. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagaimana idealnya posisi media sosial sebagai sarana pendidikan politik yang memadai bagi warga negara. Rumusan masalah yaitu bagaimana peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan literasi digital warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi literatur, wawancara serta observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran sebagai sarana pendidikan politik digital bagi warga negara sekalipun masih dalam tahap eksplorasi data mengenai kandidat dan para calon yang akan dipilih dalam konstestasi pemilu 2019. Hal ini menunjukkan eksistensi media sosial mampu menarik minat para generasi muda sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019.

Kata Kunci : *media sosial, pendidikan politik, literasi digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia dewasa ini sangat pesat dan hampir menyeluruh pada aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial politik. Salah satu hal yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah maraknya media sosial (medsos) yang banyak digunakan oleh masyarakat termasuk para mahasiswa sebagai bagian inheren dari kehidupan sosial politik kemasyarakatan di Indonesia. Oleh karenanya, penggunaan dan pemanfaatan media sosial harus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan keharusannya sebagai media interaksi dan informasi. Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 85% terhubung ke sosial media *facebook group (facebook, instagram, whatsapp messenger)* yang merupakan jumlah terbesar. Menurut infografis APJII, sebanyak 65 juta aktif menggunakan *facebook* setiap hari dan 50% bergabung digrup *facebook*. Pengguna *instagram* sebanyak 45 juta setiap hari dan jika dirata-ratakan memposting 2 kali lebih banyak dari *global average* (APJII, 2017).

Kasus yang terjadi di banyak tempat yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial cukup banyak dan menyasar kalangan anak-anak usia sekolah. Mulai dari kasus bullying, pergaulan bebas, prostitusi online serta konflik horizontal para pendukung calon kandidat pada Pemilu 2019. Permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian ini perlu diantisipasi dengan menyelenggarakan

pelatihan literasi media bagi kalangan muda. Menurut David Buchingham (2001) bahwa pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga memungkinkan anak muda sebagai konsumen media membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya, selain itu memungkinkan anak muda untuk menjadi produser media dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang berdaya di masyarakatnya.

Masyarakat sebagai pengguna media sosial perlu di berikan sisi edukasi berkaitan dengan etika serta aturan dalam penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses validasi media, baik itu media cetak, elektronik, bahkan media sosial yang bebrbasis internet, harus dianalisis melalui proses pencarian informasi dari beragam sumber. Validasi yang dilakukan bertujuan untuk mencari keberimbangan informasi yang didapatkan. Tren menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial pada anak-anak dan remaja terutama kalangan peserta didik. Pemahaman akan dampak buruk literasi digital perlu ditekankan pada pengguna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pritanova, (2017), menyebutkan bahwa pemahaman literasi. Namun, dinamika penggunaan media sosial terkini yang terjadi adalah sebaliknya. Media sosial digunakan tidak maksimal juga seringnya pembiasan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta,

hal inilah salah satunya mempengaruhi bagaimana melek politik mahasiswa sebagai salah satu pengguna media sosial menjadi tidak maksimal sehingga kebutuhan melek politik bagi pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan terhambat.

Media sosial menjadi fenomena yang makin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari cara berkomunikasi antarmanusia. Begitu pesatnya perkembangan media sosial di Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan penggunaan media sosial.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2016), statistik pengguna internet Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta, hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8% dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014. APJII juga menyebutkan jenis konten yang diakses sebanyak 97,4% adalah media sosial, dengan penggunaan terbanyak adalah jejaring Facebook sebanyak 71,6 juta (54%), dan Twitter sebanyak 7,2 juta (5,5%). APJII juga melansir bagaimana perilaku pengguna internet yang berhubungan dengan kegiatan berpolitik yakni sebanyak 75,6% setuju media sosial digunakan untuk aktivitas berpolitik. Berdasarkan gambaran di atas terlihat bagaimana aktivitas media sosial dapat digunakan sebagai sarana berpolitik.

Terlebih sejak tahun 2012, penggunaan media sosial khususnya dalam jejaring Facebook dan Twitter sering digunakan untuk kegiatan politik seperti kampanye atau

penyampaian ide. Hal tersebut juga tercermin dalam Pemilihan Presiden 2014 dimana banyak akun-akun yang berafiliasi dengan partai politik atau menjadi sarana penyampaian gagasan politik. Selain itu dewasa ini banyak juga tokoh politik yang memiliki akun media sosial Facebook ataupun Twitter, seperti anggota DPR bahkan Presiden, petinggi partai politik, dan pejabat publik lainnya. Digunakannya media sosial sebagai sarana berpolitik tentu dapat memberikan peranan bagi pengembangan literasi politik masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tentu tidak asing dengan penggunaan media sosial, baik itu sifatnya untuk hiburan, ekonomi, bahkan untuk kepentingan politik. Penggunaan media sosial untuk kepentingan kegiatan politik dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan politik yang terjadi, melihat jalannya kegiatan politik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik

. Pengembangan literasi politik yang baik menjadi vital keberadaannya dalam konteks pembangunan kualitas hidup secara demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Pengembangan literasi politik melalui struktur pembentukan dan pengembangan sosialisasi dan edukasi yang memadai dalam konteks sosial politik maka warga negara secara literal dan komprehensif akan memahami kedudukannya sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap timbulnya

kesadaran yang otonom dalam partisipasi pembangunan sistem politik dan demokrasi yang bermutu. Rumusan masalah yang ditetapkan adalah tingkat penggunaan media sosial oleh mahasiswa, tingkat kesadaran politik mahasiswa, dan peran media sosial dalam pengembangan pendidikan politik mahasiswa. Batasan penelitian hanya mengkaji bagaimana tingkat penggunaan media sosial oleh mahasiswa dan hanya mengkaji bagaimana tingkat kesadaran politik mahasiswa yang didapatkan melalui peran pendidikan politik untuk mengembangkan literasi digital para penggunanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (David Siverman dalam Deddy Mulyana, 2002: 145) . Atau metodologi adalah untuk mengkaji topik penelitian. (Bognan dan Taylor dalam Deddy Mulyana, 2002: 145). Mendasarkan pada pengertian ini, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif. Moleong (2000:3), mengemukakan :

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Metode kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Disamping itu, metode kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Arikunto (2002:215), ditinjau dari lingkup wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya melalui teknik yang sesuai dengan objek penelitian serta menginterpretasikannya dalam analisis data.

Dengan menggunakan desain ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang peran media sosial untuk mengembangkan literasi digital melalui sarana pendidikan politik warga negara. Penelitian yang dilakukan secara

komprehensif menggunakan fakta-fakta, sehingga untuk bisa mengungkap fakta-fakta tentang peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik warga negara. Penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan bertatap muka dengan subjek penelitian, namun juga mempelajari latar belakang dari objek penelitian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Deddy Mulyana (2002: 201), studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu. Dalam penelitian ini, penulis merupakan instrument penting yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial. Lebih lanjut Deddy Mulyana (2002:201) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai metode wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, (hasil) survei, dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terperinci.

Selain itu, penelitian yang dilakukan didominasi oleh pendekatan interpersonal, maksudnya adalah peneliti akan banyak melakukan kontak yang berhubungan secara langsung dengan narasumber di lokasi tempat pengambilan data. Hal ini ditujukan untuk memudahkan proses pengambilan data secara

lebih leluasa dan fleksibel serta dinamis menyesuaikan dengan kondisi natural objek penelitian. Selain itu juga berusaha mendapatkan pandangan dari orang di luar sistem dari subjek penelitian, atau dari pengamat, untuk menjaga subjektifitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik memiliki peran untuk mengembangkan kapasitas literasi digital warga negara. Hal ini dibuktikan dengan data yang dianalisis dari beberapa sub indikator temuan penelitian di bawah ini.

1. Media sosial sebagai sarana pendidikan politik

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa para informan yang memberikan penjelasan bahwa media sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan generasi muda khususnya mahasiswa yang sebagiannya menjadi pemilih pemula dalam Pemilu 2019. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial berperan besar dalam mempengaruhi preferensi politik mahasiswa untuk menentukan kandidat yang akan dipilihnya ketika hari pemungutan suara tiba. Media sosial seketika berubah yang awalnya sebagai jejaring komunikasi semata menjadi lahan para *buzzer* untuk mengkampanyekan atau memberikan ajakan untuk segera menentukan siapa yang akan dipilihnya kelak.

Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal komunikasi politik, terutama dalam kampanye Pemilu Penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik yang berbasis media sosial, terutama dalam kampanye Pemilu. Media sosial selanjutnya menggambarkan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik, selain untuk membangun dukungan komunitas kepada politisi yang tengah berkampanye. Sejumlah penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berdialog langsung dengan masyarakat dan membentuk diskusi politik. Kemampuan menciptakan ruang dialog antara politisi dengan publik serta menarik minat pemilih pemula/pemilih muda membuat media sosial semakin penting bagi politisi. Sebelum menggunakan media sosial para politisi sudah menggunakan internet untuk berkampanye. Internet bisa menjadi cara yang potensial dalam mendobrak politik demokrasi massa yang opresif yang menyuarakan suara dari bawah ke atas, yang kerap dengan power yang dimiliki, dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan golongannya. Internet diharapkan bisa menjadi media bagi mengalirnya informasi dua arah yang interaktif antara politisi dan pendukungnya. Internet menjanjikan memberikan forum yang seluas-luasnya bagi pengembangan kelompok

kepentingan dan sebagai sarana penyaluran opini.

2. Pendidikan politik berbasis media sosial untuk mengembangkan literasi digital warga negara

Analisis data penelitian menunjukkan bahwa proses pendidikan politik yang didapatkan warga negara melalui eksistensi media sosial berupa narasi kampanye dan ajakan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemungutan suara. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan warga negara dalam berpartisipasi sekalipun dalam konteks yang minimal. Pendidikan politik virtual bisa dijadikan sebagai sarana mengembangkan literasi digital warga negara sebagai substitusi pendidikan politik secara formal. Bahkan keberhasilan menggunakan media sosial dipandang sebagai salah satu faktor kesuksesan Barack Obama memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat. Sekitar 30 persen pesan-pesan kampanye Obama disampaikan melalui media baru. Beberapa tahun sebelum Obama, terdapat nama Howard Dean yang mampu memanfaatkan internet untuk meraih atensi publik AS. Namun saat itu Dean kandas di konvensi nasional Partai Demokrat (Chavez, 2012). Di Inggris, makin banyak anggota parlemen menggunakan blog dan Yahoo Groups untuk mengkomunikasikan ide mereka dan mendengarkan ide orang lain (Gurevitch, et.al. 2009). Bagaimana dengan di Indonesia? Media sosial memang mulai dilirik dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir.

Para pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama dalam kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta memanfaatkan YouTube untuk memposting video kampanye kreatif mereka. Bahkan sempat ada game online yang memiliki alur cerita seperti game Angry Birds, dengan tokoh utama Jokowi.

Tantangan Media Sosial bagi Aktor Politik

Di bagian sebelumnya sudah dipaparkan bahwa media sosial masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh para aktor politik di Indonesia. Tantangan pertama adalah hilangnya batas-batas status sosial di dunia media sosial. Menurut Coutts & Gruman (2005: 254) dalam komunikasi yang termediasi dengan komputer, maka para peserta komunikasi akan mendapatkan kesetaraan partisipasi yang lebih luas daripada tatap muka. Pendapat tersebut memang mengacu pada aktivitas komunikasi dalam organisasi. Namun relevan apabila dibawa ke dalam konteks komunikasi politik di era media sosial. Dengan adanya media sosial, maka para aktor politik pun harus menyadari meskipun dia secara riil adalah pejabat tinggi atau partai politik yang berkuasa, tetapi posisinya di media sosial akan setara dengan user lain. Maka dari itu para aktor politik harus siap-siap saja menghadapi kritik (bahkan beberapa di antaranya cenderung pedas) user lain.

Media sosial telah mengaburkan pemahaman orang, apakah yang dikatakan

tersebut merupakan sikap resmi atau hanya ungkapan pemikiran atau perasaan dia sebagai pribadi. Sikap resmi atau institutional rhetoric dan ungkapan pribadi atau *everyday talk* sering tumpang tindih.

Seseorang akan salah persepsi apakah curhat yang dilakukan oleh aktor politik di media sosial merupakan ungkapan dirinya sebagai pribadi atau mewakili institusinya. Persoalannya aktor politik di Indonesia masih belum menyadari bahwa dalam berkomunikasi di media sosial memerlukan kemampuan tersendiri.

Kemampuan di sini tentu tidak hanya kemampuan teknis, tetapi mentalitas. Kehadiran media sosial menuntut para pelaku politik untuk beradaptasi. Namun para pelaku politik tersebut sering kesulitan dalam fase adaptasi ini (Chavez, 2012). Ada beberapa hal yang berkaitan dengan “mentalitas lama” (old mentalities) seperti yang disebutkan di atas – dan hal ini umumnya dialami oleh organisasi yang menggunakan media sosial.

Salah satunya adalah mengabaikan sifat interaktif yang ada di media sosial. Dalam era politik kontemporer, politisi harus memikirkan audiens interaktif dan kapasitas mereka untuk menjawab, menanggapi, mendistribusikan dan memodifikasi pesan yang mereka terima. Penelitian Asih (2011) mengungkapkan bahwa partai politik di Indonesia mayoritas belum memaksimalkan media sosial dan media baru. Faktor interaktifitas diabaikan. Dari 34 parpol peserta

Pemilu 2009, seluruhnya memiliki website. Sayangnya situs web tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media komunikasi dua arah.

Hampir di semua website parpol tidak tersedia forum yang memungkinkan komunikasi dua arah. Kalau pun tersedia, forum ini tidak dapat diakses. Facebook dan Twitter yang digunakan oleh politisi dan partai politik ternyata isinya hanya untuk menginformasikan hal-hal yang baik-baik saja. Transaksi informasi yang terjadi didominasi oleh posting-posting yang disampaikan oleh simpatisan parpol atau politisi. Politisi dan partai politik sekadar lahah menggunakan jejaring sosial untuk berinteraksi. Media sosial masih dimanfaatkan sebagai media kampanye, belum interaktif, belum aspiratif. Padahal media sosial memiliki potensi sebagai sarana untuk mendengarkan suara masyarakat.

Di era interaktif digital, produksi pesan dan citra politik malah justru menjadi hal yang rawan untuk "diganggu". Pelaku politik harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa pesan-pesan mereka akan dimodifikasi oleh pihak lain ketika pesan tersebut disampaikan melalui media sosial. Lingkungan media digital tidak menghargai integritas informasi: ketika informasi itu sudah dipublikasikan secara online, maka siapa pun bebas untuk memodifikasinya.

PENUTUP

Pengguna media sosial secara individual, kelompok maupun institusional, dapat bertindak sebagai pengirim maupun penerima pesan dalam komunikasi di dunia maya. Fleksibilitas pemanfaatan media sosial tidak dibatasi oleh status status sosial, ekonomi dan politik yang ada di masyarakat. Media sosial memiliki kemampuan dalam kecepatan menyampaikan pesan kepada khalayak atau pengguna media sosial lainnya karena dukungan teknologi komunikasi yang mampu menjangkau khalayak lebih luas dan lebih cepat. Keunggulan ini meminggirkan pemberitaan media massa arus utama, yang memerlukan proses panjang dan verifikasi keseimbangan informasi dari sumber pesan yang dipercaya. Stratifikasi politik yang melekat pada pengguna media sosial berkaitan pula dengan perbedaan dalam menyikapi informasi yang diterima namun memiliki kesamaan dalam mendukung upaya pendidikan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni mengembangkan literasi digital warga negara. Saran dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan media sosial seharusnya sejalan dengan upaya memberikan informasi yang benar, tidak mengabaikan etika dan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan atau diteruskan kepada khalayak sebagai pengguna media sosial. Hal ini sebagai upaya untuk memberika pendidikan politik yang baik. Dalam hal keluasan jangkauan, media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk membangun jaringan komunikasi politik yang memberikan wawasan

dan edukasi positif tentang politik dalam kehidupan bernegara yang berkeadilan. Ikatan stratifikasi politik yang melekat diantara pengguna media sosial, selayaknya digunakan untuk membangun prinsip keterbukaan komunikasi demi untuk mencapai masyarakat informasi yang demokratis. Inilah yang dimaksud dengan literasi politik digital warga negara. Implikasi penelitian media sosial ini adalah, penggunaan media sosial harus mematuhi regulasi pemerintah. Pada konteks ini, dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan positivistik untuk mengetahui perilaku pengguna media sosial secara obyektif. Dalam aspek hubungan antar manusia dalam penyampaian dan penafsiran pesan, dapat dilakukan penelitian dengan pendekatan kritis, untuk mengeksplorasi konteks dan suasana sosial-budaya, ekonomi dan politik di lingkungan pengguna media sosial. Implikasi lain adalah upaya menggunakan media sosial untuk membangun literasi politik dengan menyebarkan pesan penguatan kelompok, perlu penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk mengkaji realitas yang sengaja dibentuk oleh para pengguna media sosial dalam mencari dukungan politik yang menggunakan cara dan metode yang tepat, terutama dalam upayanya memberikan pendidikan politik demi tercapainya warga negara yang paham dan sadar sebagai pengguna media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII, (2017). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mulyana, Deddy. 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Kurniawati, J dan Baroroh, S. (2016). *Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu*. JKM, Vol. 8 (2)
- Kartono, K. 1996. *Pendidikan Politik*. Mandar Maju. Bandung
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetya, A.B. (2013). *Kiprah New Media dalam Percaturan Politik di Indonesia*. Bandung: Sosiohumaniora Vol. 15 (3): 232-238.

Pratiwi, N dan Pritanova, N. (2017).
Pengaruh Literasi Digital terhadap
Psikologis Anak dan Remaja.
Jurnal Semantik. Vol 6, (1). 11-24

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.

_____. 2017. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Cetakan ke-25. Bandung : Alfabeta.

Chavez, Jonathan. 2012. #Fail: The
Misuse of Social Media Campaign
in the 2012 US Presidential
Campaign.
http://www.tcd.ie/policyinstitute/assets/pdf/PL_Chavez_March12.pdf, diakses 22 April 2019